

Pemilukada Perspektif Kearifan Lokal Empat Kesultanan Moloku Kie Raha

Baharuddin HI.MA.HI.Abdullah
IAIN Ternate, Ternate, Indonesia
dr.baharabd1972@gmail.com

Abstract

Teori-teori tentang demokrasi dan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia umumnya dan khususnya di Propinsi Maluku Utara, banyak dipengaruhi dan didominasi teori-teori barat. Tokoh-tokoh atau ahli teori politik dan demokrasi lokal atau desentralisasi banyak dikembangkan oleh para ilmuwan barat, misalnya Smith, Dennis, Rondenelli, Sabir, Cheema, Nick Devas dan lain-lain. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu implementasi dari desentralisasi politik. Pemilukada langsung diyakini banyak menghasilkan dampak-dampak positif yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat daerah. Pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan bagian dari implementasi desentralisasi daerah yang diyakini banyak membawa dampak positif bagi peyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti peningkatan partisipasi politik yang sejati, seleksi kepemimpinan politik lokal yang demokratis, berkembang pasokan pemimpin yang memadai untuk tingkat nasional. Berkembang budaya politik yang kuat untuk menopang budaya politik nasional tersedianya kepastian peningkatan kesejahteraan rakyat daerah.¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan forum group diskusi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemerintahan empat Kesultanan perspektif kearifan lokal.

Pemilihan kepala daerah langsung akan memperkuat dan menghasilkan partisipasi politik yang sejati oleh karena mereka benar-benar terlibat langsung dalam proses politik lokal. Gam Raha (kampung Empat) adalah suatu lembaga Kesultanan Ternate yang bertugas untuk mengesahkan seorang kesultana setelah melalui proses pemilihan. Begitu juga untuk memilih pemerintahan yang berdaulat jika rakyat diberikan kebebasan dalam memilih pemimpin. Hasil pemilihan ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Kearifan lokal kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Tidore, adalah merupakan empat kesultanan yang dikenal dengan nama *Moloku Kie Raha* (Empat gunung besar). Kesultanan yang memiliki wujud falsafah bernilai tinggi menunjukkan bahwa tingkat kebudayaan dalam masyarakat Ternate, Bacan, Jailolo dan

¹. Rondenelli, JR. Nellis dan G Shabbir Cheema. (1983). *Decentralization in developping Countries World Bank*. Washinton DC. hal. 9-12

Tidore memiliki tingkatan yang tinggi. Daerah-daerah di Indonesia sepatutnya diberikan hak dan kewenangan untuk membangun daerahnya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Dengan pemahaman dan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan tujuan lokal daerah dalam bingkai strategis pembangunan nasional

Kata kunci : Pemilukada, Kearifan Lokal, Empat Kesultanan

A. Pendahuluan

Teori-teori tentang demokrasi dan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia umumnya dan khususnya di Propinsi Maluku Utara, banyak dipengaruhi dan didominasi teori-teori barat. Tokoh-tokoh atau ahli teori politik dan demokrasi lokal atau desentralisasi banyak dikembangkan oleh para ilmuwan barat, misalnya Smith, Dennis, Rondenelli, Sabir, Cheema, Nick Devas dan lain-lain. Hal ini sesuai pendapat Purwo Santoso, bahwa ilmuwan barat sering menempatkan Indonesia sebagai sebuah obyek kajian yang luar biasa penting sehingga menghasilkan teori-teori besar yang diakui pada tingkat global. Seperti Clifford Geetz, Benedict Anderson, Harold Crouch, Collin Brown, aniel S. Lev dan lain-lain mereka adalah ilmuwan-ilmuwan barat.²

Tak ketinggalan pula Muhammad yusuf dari Pakistan yang memperoleh hadiah nobel, yang melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Batu, Malang yang terkait dengan sistem arisan, yang dikembangkan menjadi *Gramenne Bank*. Hal ini menunjukkan bahwa local wisdom yang sesungguhnya banyak hidup dan dimiliki oleh negara Indonesia hanya belum banyak digali dan digunakan sendiri oleh masyarakat lokal yang bersangkutan. Lokal wisdom atau kearifan lokal yang menempatkan budaya-budaya lokal yang baik dan positif untuk dikembangkan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan masyarakat.

B. Kajian Teori

Dalam perspektif teoritik, pemilihan kepala daerah yang merupakan salah satu pilar pesta demokrasi di daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap upaya perwujudan demokrasi dan good governance di daerah. Desentralisasi di yakini mampu memberikan jalan terbaik untuk

². Santoso, P. (2011). *Ilmu Sosial Transformatif, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM, Yogyakarta. hal. 1-4*

meningkatkan kesejahteraan rakyat.³ Pelaksanaan desentralisasi memiliki keuntungan beberapa hal antara lain:

Pertama, desentralisasi merupakan sarana pendidikan politik yang mengajarkan masyarakat banyak tentang arti penting peran debat politik dalam seleksi, kepemimpinan dalam sebuah demokrasi lokal. Sebagai sarana pendidikan politik. Pilkada langsung memberikan contoh-contoh positif dan elegan yang perlu terus ditumbuhkembangkan oleh seluruh elemen yang terlibat didalamnya. Realitas di lapangan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan, akan tetapi upaya-upaya positif untuk mewujudkan tujuan ini harus tetap dilaksanakan mengingat arti penting mewujudkan moral politik yang positif dalam penyelenggaraan politik lokal.

Kedua, desentralisasi merupakan training dalam kepemimpinan politik yang akan menghasilkan pemimpin politik yang akan menghasilkan pemimpin politik yang cukup dalam pembuatan keputusan, konsultasi public dan berbagai dimensi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Ini banyak dibuktikan di Amerika Serikat yaitu bahwa cukup banyak Presiden yang sebelumnya menjabat Gubernur di negara bagian. Hal ini semacam ini memang perlu dikembangkan karena memang pengalaman di Indonesia training kepemimpinan politik pada jabatan-jabatan strategis belum begitu terasa khususnya terjadi promosi kepemimpinan politik dari lokal ke nasional. Walaupun untuk posisi lembaga perwakilan training kepemimpinan politik ini lebih dirasakan ketimbang pada posisi kepemimpinan eksekutif.

Ketiga, dengan desentralisasi maka stabilitas politik dapat terjaga karena partisipasi yang besar dalam politik melalui demokrasi lokal. Bahkan kepercayaan kepada pemerintah akan meningkatkan harmoni sosial, semangat kebersamaan dan stabilitas politik dapat dijaga dan ditingkatkan. Asumsi dasarnya adalah semakin besar ruang partisipasi public dalam pilkada langsung berarti memenuhi kebutuhan partisipasi public yang memang dibutuhkan semua level penyelenggaraan demokrasi.

Keempat. Desentralisasi akan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan karena masyarakat lokal terintegrasikan pada sistem desentralisasi yang memang mempromosikan partisipasi masyarakat lokal, peningkatan pelayanan publik dan akses lokal yang lebih besar. Desentralisasi akan meningkatkan kepekaan pemerintah karena perwakilan

³. Smith. T, M. (1990). *Decentralisation, Tradition and Change in Indonesia*, Transcation Publishers, Newe Bruswick. USA .hal. 5-8

rakyat lokal yang mengetahui lebih banyak kebutuhan dan situasi lokal dan bagaimana konsen-konsen agar perwakilan rakyat daerah tetap berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan rakyat menjadi penting. Selama ini memang perwakilan daerah lebih banyak mewakili kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat banyak.

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu implementasi dari desentralisasi politik. Pemilukada langsung diyakini banyak menghasilkan dampak-dampak positif yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat daerah. Pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan bagian dari implementasi desentralisasi daerah yang diyakini banyak membawahkan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti peningkatan partisipasi politik yang sejati, seleksi kepemimpinan politik lokal yang demokratis, berkembang pasokan pemimpin yang memadai untuk tingkat nasional. Berkembang budaya politik yang kuat untuk menopang budaya politik nasional tersedianya kepastian peningkatan kesejahteraan rakyat daerah.⁴

Pemilihan kepala daerah langsung akan memperkuat dan menghasilkan partisipasi politik yang sejati oleh karena mereka benar-benar terlibat langsung dalam proses politik lokal. Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Tidore, adalah merupakan empat kesultanan yang dikenal dengan nama *Moloku Kie Raha* (Empat gunung besar). Kesultanan yang memiliki wujud falsafah bernilai tinggi menunjukkan bahwa tingkat kebudayaan dalam masyarakat Ternate, Bacan, Jailolo dan Tidore memiliki tingkatan yang tinggi. Kesultanan Ternate salah kesultanan yang lebih maju hal ini terlihat dari peradaban masyarakat Ternate. *Fala Raha* (Empat Rumah) merupakan makna filosofi yang terkandung didalam budaya.

Fala Raha, falsafah budaya yang merupakan dasar dalam pemahaman masyarakat Ternate yang diterapkan pada struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, masih terjaga kelestariaan hingga kini. *Fala Raha* tidak hanya sekedar struktur pembagian atau pembentuk konsep kolano semata, namun mencerminkan pemahaman yang baik tentang baik bersifat politis seperti yang tertulis dalam kisah-kisah motologi Maluku Utara. Kolano adalah konsep sebutan pemimpin terpilih yang mumpuni secara lahir bathin dimana awalnya pemufakatan ini dibentuk dalam rangka untuk memperkuat

⁴. Rondenelli, JR. Nellis dan G Shabbir Cheema. (1983). *Decentralization in developing Countries World Bank*. Washinton DC.hal. 9-12

jalanan kerja sama antar tiap momole. Momole adalah sebutan pemimpin kampung (kepala marga). *Fala Raha* merupakan salah satu aspek dari terbentuknya konsep kesultanan yang dalam perwujudan merupakan dasar dari konsep ketatanegaraan yang ada di kesultanan Ternate.

Zaman momole merupakan fase sebelum konsep *kolano* pada sejarah terbentuknya kesultanan Ternate. Dimana empat *momole*, yaitu *momole Tobona*, *momole Toboleu*, *momole Foradiahi* dan *momole Tabanga*.⁵ Analisa struktur sosial politik dalam *Fala Raha* merupakan konsep besar dari proses terbentuknya empat kesultanan. *Fala Raha* merupakan konsep besar dari proses terbentuknya empat kesultanan di Maluku Utara. *Fala Raha* dapat dibagi menjadi *satu*, struktur empat keturunan, *dua*, struktur empat warisan simbolik, *tiga*, struktur empat kekuasaan politik, *keempat*, struktur komunitas awal Ternate, *lima*, struktur empat komunitas awal Ternate, *enam*, struktur empat klan utama dan *ketujuh*, struktur empat lembaga pemerintahan, itulah disebut konsep *Fala Raha*. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pemilukada Dalam Perspektif Kearifan Lokal Fala Raha Empat Kesultanan Moloku Kie Raha.

C. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan forum group diskusi, dengan analisis deskriptif kualitatif.

D. Pembahasan dan Hasil

1. Pemilukada Di Indonesia

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, dengan kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi desentralistis. Secara umum undang-undang tentang pemerintahan daerah telah mengalami kemajuan bagi daerah dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. namun disisi lain undang-undang ini menimbulkan negative, seperti tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja

⁵. Amin Safruddin. (2011). *Ternate, Analisis Struktur Terhadap Mitos “Tujuh Putri” pada Kebudayaan Ternate Maluku Utara*, LIPI Cibinong Bogor.

kecil karena luas kewenangan yang dimiliki, tidak jelas hubungan hirarkhis dengan pemerintahan di atasnya, tumbuhnya korupsi dan nepotisme di daerah akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan di daerah serta money politik yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah.⁶

Untuk itu pemerintah melakukan perubahan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan. Undang-undang ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah ini secara langsung merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dan anat konstitusi Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala daerah Propinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pelaksanaan pilkada langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi ditingkat lokal. Dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara tersebut menyalurkan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi kepentingan dan suara rakyat. Winarno menyatakan bahwa sistem pemilihan secara langsung merupakan alternative yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintahan dan pada saat yang sama membaerikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih.

Sementara menurut Bambang Purwako bahwa Pilkada langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik, adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan

⁶. Abdullah Rosada. (2005). *Teori Pilkada di Indonesia*. Jakarta, hal.3

Pemilukada Perspektif Kearifan Lokal...

kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung proses demokrasi di tingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki rakyat di daerahnya, sehingga pemimpin rakyat dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggungjawab sesuai potensi sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat di daerahnya, sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggungjawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakan pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yaitu melaksanakan kedaulatan rakyat.

Menurut agung Djokosukarto, ada lima dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepada daerah secara langsung yaitu :

- a. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik
- b. Mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif
- c. Mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah
- d. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi.

2. Pemilukada langsung

Pemilukada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal. Mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktifitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi dan memperluas akses masyarakat lokal untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang menjangkut kepentingan mereka. Pemilukada yang terpenting adalah sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang terpilih akan kuatnya legitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah.

3. Kearifan Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama dan kultur semuanya berada dalam bingkai ke Bhineka Ika guna mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan oleh pendiri negara. Kearifan lokal harus dipelihara dan dijaga untuk kelestarian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Daerah-daerah di Indonesia sepatutnya diberikan hak dan kewenangan untuk membangun daerahnya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Dengan pemahaman dan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan tujuan lokal daerah dalam bingkai strategis pembangunan nasional. Desentralisasi inilah yang diharapkan oleh masyarakat di daerah. Menjadi sebuah kebanggaan di daerah pembangunan berdasarkan kearifan lokal dan pemimpin yang lahir berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Kelestarian budaya lokal dalam pemilihan kepala daerah maupun pelaksanaan tugas kepala daerah berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, maka terlindungi nilai-nilai kearifan lokal. Satu sisi lainnya mereka merasa terlindungi atas kebijakan-kebijakan nasional yang telah dirumuskan bersama.

Penghargaan dan pemberian hak yang wajar dan profesional kepada daerah diyakini akan mampu mengikis upaya pembusukan Negara Kesatuan republik Indonesia dari dalam seperti saparatsime yang kerap mengumandangkan isu etno nasionalisme. Sebaliknya identitas yang berbeda-beda di setiap daerah akan menjadi kekuatan dahsyat dalam mengangkat jati diri bangsa. Dengan cara seperti itulah Indonesia menjadi negara yang besar disegani dan dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengakomodir dan memberi beberapa hak kepada Pemerintah Daerah, terutama Papua dan Aceh, merupakan wujud dari pengamalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan republic Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan republic Indonesia.

Prof. Nyoman Sirtha dalam Sartini menyatakan bahwa kearifan lokal mempunyai beberapa fungsi dan makna yaitu :

1. Berfungsi sebagai konserfasi dan kelestarian alam

2. Berfungsi untuk mengembangkan sumber daya alam dan makna yaitu :
3. Berfungsi sebagai konservasi dan kelestarian alam
4. Berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia
5. Bermakna etika dan moral
6. Bermakna politik.⁷

4. Fala Raha Dalam Kearifan Lokal

Makna *Fala Raha* sebagai konsep dasar pada budaya masyarakat Maluku Utara, dalam perspektif pola 4 kajian Transformasi budaya yang berangkat dari latar belakang mengenai masyarakat Maluku Utara (Ternate), serta falsafah yang ada pada konsep *fala Raha*. Dalam kajian ini terdapat beberapa komponen yang dikaji diantaranya, struktur empat keturunan, struktur empat warisan simbolik, struktur empat kekuasaan politik, struktur empat komunitas awal Ternate, struktur empat yang disebut konsep *Fala Raha*. Elemen-elemen *Fala Raha* dapat membentuk makna di masyarakat Maluku Utara dan makna filosofi yang terkandung didalamnya.

Kesultanan Ternate merupakan dari empat kesultanan yang di Maluku Utara. Empat kesultanan yang lebih dikenal dengan nama *Moloku Kie Raha* (empat gunung besar). Kesultanan yang memiliki wujud dan falsafah bernilai tinggi ini merupakan bahwa tingkat kebudayaan dalam masyarakat Ternate memiliki tingkatan yang tinggi pula. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa peradaban masyarakat Ternate sejak dahulu sangatlah maju, terlihat jelas pada makna filosofi yang terkandung didalamnya.

Folklor bahwa sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun temurun, diantara kolektif secara tradisional, dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Disamping itu Danandja juga membagi ciri-ciri pengenal utama Folklor adalah sebagai berikut :

- a. Penyebaran dan pewarisan biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebabkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu dari satu generasi ke generasi berikut.
- b. Folklor bersifat tradisional yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap dalam bentuk standar, disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama.

⁷. Sartini (2004). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Suatu Kajian Filsafati*. Dalam jurnal Filsafat, Agustus. 2004 Jilid. 37 No.2 hal. 111

- c. Folklor ada dalam versi-versi bahkan dalam varian-varian yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh cara penyebaran dari mulut ke mulut (lisan) biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga oleh proses manusia lupa diri manusia atau proses interpolasi. Folklor dengan mudah mengalami perubahan. Walaupun demikian perbedaannya hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan.
- d. Folklor bersifat anonym yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi.

Kesatuan geopolitik merupakan wujud transformasi dari bentuk-bentuk empat sruktur sebelumnya. Dimana dalam struktur empat sebelumnya merupakan konsep penjabaran dari mitos tujuh putri yang menjaadi fondasi awal cerita.Wujud transformasi ini menjadi konsep atau sistem pemerintahan yang bersifat politik, kesatuan geopolitik tersebut yang dinamakan sebagai *Moloku Kie Raha* (Empat Gunung Maluku).¹

Setiap gunung atau pulau dipersatukan secara horizontal, dan tidak ada makna bahwa yang satu lebih utama atau lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan yang lain. konsep ini sesuai dengan pola empat jakob sumardjo, dimana pola empat ini mengarahkan pandangan kita akan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam gelar disandang dari keempat kesultanan tersebut. Desentraliasi pemilukada dengan wujud kearifan lokal dapat mengangkat nilai-nilai adat seatoran yang terjewantahkan dalam diri seorang kepala daerah. Dengan tujuan untuk masyarakat yang adil, sejahtera, makmur dan berperdaban.

Referensi

- Adam, Amal M. (2002). Kepulauan rempah-rempah, Perjalanan sejarah Maluku Utara 1250-1950. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta
- D, Robertson. (2000). Dictionary of Politics. Penguin Books. Londonha.
- Mahdi, Ahmad. (2011). Kamus Ternate-Indonesia-Inggris. UPI-Press. Bandung
- Marijan, Kacung. (2007). Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Ekonomi dan Demokrasi Lokal. t.p, t.tp.
- Muluk, Khairul M.R (2007). Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Bayu Publishing. Malang.

Pemilukada Perspektif Kearifan Lokal...

- Myungsuk, Lee. (2003). *Conceptualizing the New Governance: A New Institution of Social*. t.p, t.tp.
- Prasojo, Eko. (2007). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pratikno, Hal-Hal Krusial Dalam Revisi Tentang Pilkada*. t.p, t.tp.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah*.
- Rondinelli, JR. Nellis dan Cheena, G. Shabbir. (1983). *Decentralization in Developing Countries*. t.p, t.tp.
- Sarifudin, Amir. (2011). *Ekologi Ternate, analisis structural Terhadap Mitos "tujuh Putri" pada Kebudayaan Ternate Maluku Utara*. LIPI Cibinong. Bogor.
- Sartini (2004). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Suatu Kajian Filsafati* . Dalam jurnal *Filsafat*, Agustus. 2004 Jilid. 37 No.2
- T.M, Smith. (1990). *Decentralization, Tradition and Change in Indonesia*. Transaction Publisher, new Brunswicck. USA Coordination, Indiana University. Bloomington Indiana.
- Wang, Shaoguang. (2006). *Democracy and State Effectiveness*. World Bank. Washinton DC.
- Widodo, Joko. (2003). *Teori Administrasi Negara*. Program Paska Sarjana UNTAG. Surabaya.